



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
21. Azas merata adalah besar bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut BHPRM.
22. Azas proposional adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah secara formulasi berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel, variabel yang selanjutnya disebut BHPRP.
23. Variabel independen yaitu digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa dibedakan atas variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa yang selanjutnya disebut BDx.

BAB II
PERHITUNGAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Rumus untuk menentukan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

a. $BH_x = BHPRM + \sum BHPRP_x$

Keterangan :

BH_x : Bagi Hasil untuk Desa X.

$BHPRM$: Bagi Hasil Minimal yang diterima Desa.

$BHPRP_x$: Bagi Hasil Formulasi untuk Desa X.

b. $BHPR_x = BD_x \times (BH - \sum BHPR)$

Keterangan :

$BHPRP_x$: Bagi Hasil Formulasi untuk Desa X.

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X.

$BHPR$: Total Bagi hasil untuk Kabupaten.

$\sum BHPR$: Jumlah seluruh Dana Bagi Hasil Pajak Daerah.

- (2) Penetapan Rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa diatur sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata dan 40 % (empat puluh perseratus) dibagi dengan Variabel independen yang terdiri dari :
 - a. 25 % (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk Luas Wilayah; dan
 - d. 30 % (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Penetapan Rincian besaran bagian Desa dari bagi Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 4

Pencairan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 5

- (1) Permohonan pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan diketahui oleh Camat.
- (2) Permohonan pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahap I dilampiri:
 - a. Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Fotocopy nomor rekening kas Desa pada Bank Umum; dan
 - c. Laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya.
- (3) Permohonan pencairan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahap II dilampiri:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I kepada Bupati; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh perseratus).

**Bagian Ketiga
Penyaluran**

Pasal 6

Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

**BAB IV
PENGUNAAN**

Pasal 7

- (1) Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDesa dan RKPDes.

**BAB V
LAPORAN**

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 April 2017
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 19 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir.H.MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017
NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2017, 18 APRIL 2017
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN PENGGUNAAN DAN
PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA**

No.	Kecamatan dan Desa	alokasi Dana Desa	60%	40%
1	2	3	4	
I	MUARA MUNTAI			
1	PERIAN	Rp 37.272.901	Rp 22.363.740	Rp 14.909.160
2	MUARA LEKA	Rp 35.251.052	Rp 21.150.631	Rp 14.100.421
3	MUARA ALOH	Rp 30.316.101	Rp 18.189.660	Rp 12.126.440
4	JANTUR	Rp 33.649.014	Rp 20.189.408	Rp 13.459.606
5	BATUQ	Rp 30.749.958	Rp 18.449.975	Rp 12.299.983
6	REBAQ RINDING	Rp 30.546.629	Rp 18.327.977	Rp 12.218.652
7	MUARA MUNTAI ULU	Rp 37.295.832	Rp 22.377.499	Rp 14.918.333
8	MUARA MUNTAI ILIR	Rp 32.571.021	Rp 19.542.613	Rp 13.028.408
9	KAYU BATU	Rp 45.559.646	Rp 27.335.787	Rp 18.223.858
10	JANTUR SELATAN	Rp 36.445.137	Rp 21.867.082	Rp 14.578.055
11	TANJUNG BATUQ HARAPAN	Rp 30.639.055	Rp 18.383.433	Rp 12.255.622
12	PULAU HARAPAN	Rp 31.720.547	Rp 19.032.328	Rp 12.688.219
13	JANTUR BARU	Rp 33.263.923	Rp 19.958.354	Rp 13.305.569
II	LOA KULU			
14	JONGGON	Rp 45.449.517	Rp 27.269.710	Rp 18.179.807
15	SUNGAI PAYANG	Rp 44.052.133	Rp 26.431.280	Rp 17.620.853
16	JEMBAYAN	Rp 53.495.527	Rp 32.097.316	Rp 21.398.211
17	LOA KULU KOTA	Rp 46.427.745	Rp 27.856.647	Rp 18.571.098
18	LOH SUMBER	Rp 44.208.931	Rp 26.525.358	Rp 17.683.572
19	PONORAGAN	Rp 33.298.588	Rp 19.979.153	Rp 13.319.435
20	REMPANGA	Rp 31.223.322	Rp 18.733.993	Rp 12.489.329
21	MARGA RAHAYU	Rp 39.153.286	Rp 23.491.972	Rp 15.661.314
22	JONGGON JAYA	Rp 37.340.267	Rp 22.404.160	Rp 14.936.107
23	LUNG ANAI	Rp 32.914.746	Rp 19.748.848	Rp 13.165.898
24	JEMBAYAN TENGAH	Rp 32.039.888	Rp 19.223.933	Rp 12.815.955
25	JEMBAYAN DALAM	Rp 37.700.909	Rp 22.620.545	Rp 15.080.363
26	SEPAKAT	Rp 29.844.021	Rp 17.906.413	Rp 11.937.609
27	SUMBER SARI	Rp 35.365.368	Rp 21.219.221	Rp 14.146.147
28	JONGKANG	Rp 32.348.015	Rp 19.408.809	Rp 12.939.206
III	LOA JANAN			
29	BAKUNGAN	Rp 54.618.819	Rp 32.771.291	Rp 21.847.527
30	LOA DURI ULU	Rp 50.007.775	Rp 30.004.665	Rp 20.003.110
31	LOA JANAN ULU	Rp 75.523.797	Rp 45.314.278	Rp 30.209.519
32	PURWAJAYA	Rp 46.959.697	Rp 28.175.818	Rp 18.783.879
33	TANI BHAKTI	Rp 34.749.106	Rp 20.849.464	Rp 13.899.642
34	BATUAH	Rp 47.413.060	Rp 28.447.836	Rp 18.965.224
35	LOA DURI ILIR	Rp 57.274.219	Rp 34.364.531	Rp 22.909.688
36	TANI HARAPAN	Rp 34.836.983	Rp 20.902.190	Rp 13.934.793
IV	ANGGANA			
37	SEPATIN	Rp 40.007.133	Rp 24.004.280	Rp 16.002.853
38	MUARA PANTUAN	Rp 37.428.754	Rp 22.457.253	Rp 14.971.502
39	TANI BARU	Rp 38.047.606	Rp 22.828.564	Rp 15.219.042
40	KUTAI LAMA	Rp 33.334.183	Rp 20.000.510	Rp 13.333.673
41	ANGGANA	Rp 38.043.664	Rp 22.826.198	Rp 15.217.465
42	SUNGAI MERIAM	Rp 54.481.646	Rp 32.688.988	Rp 21.792.658
43	SIDOMULYO	Rp 39.047.449	Rp 23.428.469	Rp 15.618.980
44	HANDIL TERUSAN	Rp 48.884.782	Rp 29.330.869	Rp 19.553.913
V	MUARA BADAK			
45	SELIKI	Rp 52.267.933	Rp 31.360.760	Rp 20.907.173
46	SALO PALAI	Rp 36.185.287	Rp 21.711.172	Rp 14.474.115
47	MUARA BADAK ULU	Rp 52.123.477	Rp 31.274.086	Rp 20.849.391
48	MUARA BADAK ILIR	Rp 48.909.367	Rp 29.345.620	Rp 19.563.747
49	TANJUNG LIMA	Rp 51.804.950	Rp 31.082.970	Rp 20.721.980
50	TANAH DATAR	Rp 33.860.010	Rp 20.316.006	Rp 13.544.004

51	BADAK BARU	Rp	51.450.720	Rp	30.870.432	Rp	20.580.288
52	SUKA DAMAI	Rp	38.080.575	Rp	22.848.345	Rp	15.232.230
53	BADAK MEKAR	Rp	40.142.138	Rp	24.085.283	Rp	16.056.855
54	GAS ALAM BADAK I	Rp	60.828.051	Rp	36.496.831	Rp	24.331.221
55	BATU-BATU	Rp	31.673.535	Rp	19.004.121	Rp	12.669.414
56	SALO CELLA	Rp	41.012.235	Rp	24.607.341	Rp	16.404.894
57	SUNGAI BAWANG	Rp	36.112.931	Rp	21.667.758	Rp	14.445.172

VI	TENGGARONG						
58	RAMPAK LAMBUR	Rp	38.652.817	Rp	23.191.690	Rp	15.461.127
59	BENDANG RAYA	Rp	34.960.582	Rp	20.976.349	Rp	13.984.233

VII	SEBULU						
60	SELERONG	Rp	38.171.158	Rp	22.902.695	Rp	15.268.463
61	TANJUNG HARAPAN	Rp	36.474.341	Rp	21.884.605	Rp	14.589.736
62	BELORO	Rp	33.632.666	Rp	20.179.599	Rp	13.453.066
63	SEBULU ULU	Rp	43.946.339	Rp	26.367.803	Rp	17.578.535
64	SEBULU ILIR	Rp	41.437.720	Rp	24.862.632	Rp	16.575.088
65	SEGIHAN	Rp	38.199.088	Rp	22.919.453	Rp	15.279.635
66	SUMBER SARI	Rp	50.954.213	Rp	30.572.528	Rp	20.381.685
67	MANUNGGAL JAYA	Rp	42.626.230	Rp	25.575.738	Rp	17.050.492
68	GIRI AGUNG	Rp	34.425.303	Rp	20.655.182	Rp	13.770.121
69	SENONI	Rp	37.893.647	Rp	22.736.188	Rp	15.157.459
70	SEBULU MODEREN	Rp	41.754.927	Rp	25.052.956	Rp	16.701.971
71	SANGGULAN	Rp	42.014.564	Rp	25.208.738	Rp	16.805.826
72	LEKAQ KIDAU	Rp	35.113.587	Rp	21.068.152	Rp	14.045.435
73	MEKAR JAYA	Rp	40.470.304	Rp	24.282.183	Rp	16.188.122

VIII	KOTA BANGUN						
74	KEDANG IPIL	Rp	33.387.320	Rp	20.032.392	Rp	13.354.928
75	BENUA BARU	Rp	29.323.165	Rp	17.593.899	Rp	11.729.266
76	SEDULANG	Rp	31.079.030	Rp	18.647.418	Rp	12.431.612
77	LOLENG	Rp	33.008.087	Rp	19.804.852	Rp	13.203.235
78	KOTA BANGUN ULU	Rp	34.596.357	Rp	20.757.814	Rp	13.838.543
79	KOTA BANGUN ILIR	Rp	35.358.466	Rp	21.215.079	Rp	14.143.386
80	LIANG	Rp	30.078.194	Rp	18.046.917	Rp	12.031.278
81	MUHURAN	Rp	31.991.348	Rp	19.194.809	Rp	12.796.539
82	PELA	Rp	29.029.624	Rp	17.417.774	Rp	11.611.849
83	KOTA BANGUN I	Rp	31.196.917	Rp	18.718.150	Rp	12.478.767
84	KOTA BANGUN II	Rp	34.096.448	Rp	20.457.869	Rp	13.638.579
85	KOTA BANGUN III	Rp	34.474.818	Rp	20.684.891	Rp	13.789.927
86	SUMBER SARI	Rp	31.912.898	Rp	19.147.739	Rp	12.765.159
87	SARI NADI	Rp	32.899.368	Rp	19.739.621	Rp	13.159.747
88	SUKA BUMI	Rp	31.724.419	Rp	19.034.652	Rp	12.689.768
89	WONOSARI	Rp	29.954.017	Rp	17.972.410	Rp	11.981.607
90	KEDANG MURUNG	Rp	37.811.898	Rp	22.687.139	Rp	15.124.759
91	KOTA BANGUN SEBRANG	Rp	32.229.017	Rp	19.337.410	Rp	12.891.607
92	LIANG ULU	Rp	32.081.860	Rp	19.249.116	Rp	12.832.744
93	SEBELIMBINGAN	Rp	30.522.974	Rp	18.313.784	Rp	12.209.189
94	SANGKULIMAN	Rp	27.745.351	Rp	16.647.211	Rp	11.098.140

IX	KENOHAN						
95	LAMIN TELIHAN	Rp	39.535.971	Rp	23.721.583	Rp	15.814.388
96	LAMIN PULUT	Rp	31.791.666	Rp	19.074.999	Rp	12.716.666
97	TELUK BINGKAI	Rp	36.151.924	Rp	21.691.155	Rp	14.460.770
98	KAHALA	Rp	33.550.293	Rp	20.130.176	Rp	13.420.117
99	TUBUHAN	Rp	32.768.608	Rp	19.661.165	Rp	13.107.443
100	SEMAYANG	Rp	34.130.551	Rp	20.478.330	Rp	13.652.220
101	TELUK MUDA	Rp	29.831.090	Rp	17.898.654	Rp	11.932.436
102	TUANA TUHA	Rp	35.667.540	Rp	21.400.524	Rp	14.267.016
103	KAHALA ILIR	Rp	31.319.884	Rp	18.791.931	Rp	12.527.954

X	KEMBANG JANGGUT						
104	GENTING TANAH	Rp	41.617.396	Rp	24.970.437	Rp	16.646.958
105	LOA SAKUH	Rp	32.832.798	Rp	19.699.679	Rp	13.133.119
106	HAMBAU	Rp	47.053.155	Rp	28.231.893	Rp	18.821.262
107	KEMBANG JANGGUT	Rp	42.102.092	Rp	25.261.255	Rp	16.840.837
108	KELEKAT	Rp	33.012.077	Rp	19.807.246	Rp	13.204.831

109	PULAU PINANG	Rp	31.202.908	Rp	18.721.745	Rp	12.481.163
110	LONG BELEH HALOQ	Rp	32.105.544	Rp	19.263.326	Rp	12.842.218
111	LONG BELEH MODANG	Rp	35.400.420	Rp	21.240.252	Rp	14.160.168
112	MUAI	Rp	32.685.709	Rp	19.611.425	Rp	13.074.283
113	PERDANA	Rp	29.591.862	Rp	17.755.117	Rp	11.836.745
114	BUKIT LAYANG	Rp	41.089.636	Rp	24.653.782	Rp	16.435.855

XI	MUARA KAMAN						
115	MUARA KAMAN ILIR	Rp	37.794.860	Rp	22.676.916	Rp	15.117.944
116	RANTAU HEMPANG	Rp	33.402.563	Rp	20.041.538	Rp	13.361.025
117	TERATAK	Rp	34.782.869	Rp	20.869.721	Rp	13.913.147
118	BENUA PUHUN	Rp	35.193.869	Rp	21.116.322	Rp	14.077.548
119	MUARA KAMAN ULU	Rp	38.345.833	Rp	23.007.500	Rp	15.338.333
120	SABINTULUNG	Rp	43.247.451	Rp	25.948.470	Rp	17.298.980
121	MUARA SIRAN	Rp	35.400.901	Rp	21.240.541	Rp	14.160.360
122	TUNJUNGAN	Rp	31.467.047	Rp	18.880.228	Rp	12.586.819
123	SEDULANG	Rp	40.856.654	Rp	24.513.992	Rp	16.342.661
124	MENAMANG KIRI	Rp	45.390.726	Rp	27.234.436	Rp	18.156.291
125	MENAMANG KANAN	Rp	33.027.990	Rp	19.816.794	Rp	13.211.196
126	SIDOMUKTI	Rp	45.436.277	Rp	27.261.766	Rp	18.174.511
127	PANCA JAYA	Rp	43.215.922	Rp	25.929.553	Rp	17.286.369
128	BUNGA JADI	Rp	44.229.488	Rp	26.537.693	Rp	17.691.795
129	KUPANG BARU	Rp	35.922.734	Rp	21.553.640	Rp	14.369.093
130	LEBAHU ULOQ	Rp	31.612.738	Rp	18.967.643	Rp	12.645.095
131	BUKIT JERING	Rp	33.129.333	Rp	19.877.600	Rp	13.251.733
132	LIANG BUAYA	Rp	33.972.543	Rp	20.383.526	Rp	13.589.017
133	PUAN CEPAK	Rp	32.773.838	Rp	19.664.303	Rp	13.109.535
134	CIPARI MAKMUR	Rp	32.359.489	Rp	19.415.693	Rp	12.943.796

XII	TABANG						
135	GUNUNG SARI	Rp	29.143.271	Rp	17.485.962	Rp	11.657.308
136	LONG LALANG	Rp	27.764.051	Rp	16.658.431	Rp	11.105.621
137	MUARA RITAN	Rp	32.901.221	Rp	19.740.732	Rp	13.160.488
138	BULUK SEN	Rp	31.933.476	Rp	19.160.086	Rp	12.773.390
139	UMAQ DIAN	Rp	28.378.176	Rp	17.026.906	Rp	11.351.271
140	MUARA PEDOHON	Rp	28.940.883	Rp	17.364.530	Rp	11.576.353
141	BILA TALANG	Rp	30.096.159	Rp	18.057.695	Rp	12.038.463
142	KAMPUNG BARU	Rp	30.355.635	Rp	18.213.381	Rp	12.142.254
143	UMAQ TUKUNG	Rp	30.362.822	Rp	18.217.693	Rp	12.145.129
144	SIDOMULYO	Rp	30.678.146	Rp	18.406.888	Rp	12.271.258
145	UMAQ BEKUAY	Rp	29.487.590	Rp	17.692.554	Rp	11.795.036
146	TABANG LAMA	Rp	30.743.388	Rp	18.446.033	Rp	12.297.355
147	MUARA TIQ	Rp	28.400.243	Rp	17.040.146	Rp	11.360.097
148	MUARA SALUNG	Rp	30.413.460	Rp	18.248.076	Rp	12.165.384
149	MUARA KEBAQ	Rp	31.072.346	Rp	18.643.408	Rp	12.428.938
150	MUARA BELINAU	Rp	30.545.500	Rp	18.327.300	Rp	12.218.200
151	MUARA TUBOD	Rp	30.142.744	Rp	18.085.646	Rp	12.057.097
152	RITAN BARU	Rp	32.297.392	Rp	19.378.435	Rp	12.918.957
153	TUKUNG RITAN	Rp	31.202.935	Rp	18.721.761	Rp	12.481.174

XIII	SAMBOJA						
154	KARYA JAYA	Rp	34.174.193	Rp	20.504.516	Rp	13.669.677
155	BUKIT RAYA	Rp	35.736.861	Rp	21.442.116	Rp	14.294.744
156	TANI BHAKTI	Rp	40.871.450	Rp	24.522.870	Rp	16.348.580
157	BERINGIN AGUNG	Rp	31.578.732	Rp	18.947.239	Rp	12.631.493

XIV	TENGGARONG SEBERANG						
158	MANUNGGAL JAYA	Rp	42.630.818	Rp	25.578.491	Rp	17.052.327
159	BUKIT RAYA	Rp	40.502.091	Rp	24.301.254	Rp	16.200.836
160	EMBALUT	Rp	32.651.850	Rp	19.591.110	Rp	13.060.740
161	BANGUN REJO	Rp	54.068.616	Rp	32.441.170	Rp	21.627.447
162	KERTA BUANA	Rp	44.497.846	Rp	26.698.708	Rp	17.799.138
163	SEPARI	Rp	62.066.735	Rp	37.240.041	Rp	24.826.694
164	BUKIT PARIAMAN	Rp	44.240.180	Rp	26.544.108	Rp	17.696.072
165	BUANA JAYA	Rp	38.430.317	Rp	23.058.190	Rp	15.372.127
166	MULAWARMAN	Rp	35.965.328	Rp	21.579.197	Rp	14.386.131
167	LOA ULUNG	Rp	35.746.003	Rp	21.447.602	Rp	14.298.401
168	LOA RAYA	Rp	29.917.767	Rp	17.950.660	Rp	11.967.107
169	PERJIWA	Rp	30.110.449	Rp	18.066.269	Rp	12.044.179

170	TELUK DALAM	Rp	29.532.965	Rp	17.719.779	Rp	11.813.186
171	LOA LEPU	Rp	30.191.911	Rp	18.115.147	Rp	12.076.764
172	SUKA MAJU	Rp	42.887.043	Rp	25.732.226	Rp	17.154.817
173	LOA PARI	Rp	36.911.985	Rp	22.147.191	Rp	14.764.794
174	KARANG TUNGGAL	Rp	41.186.603	Rp	24.711.962	Rp	16.474.641
175	TANJUNG BATU	Rp	31.372.862	Rp	18.823.717	Rp	12.549.145

XV	MARANGKAYU						
176	SEBUNTAL	Rp	68.431.955	Rp	41.059.173	Rp	27.372.782
177	SANTAN ULU	Rp	63.341.377	Rp	38.004.826	Rp	25.336.551
178	SANTAN TENGAH	Rp	39.243.902	Rp	23.546.341	Rp	15.697.561
179	SANTAN ILIR	Rp	35.276.860	Rp	21.166.116	Rp	14.110.744
180	KERSIK	Rp	36.156.248	Rp	21.693.749	Rp	14.462.499
181	BUNGA PUTIH	Rp	36.785.314	Rp	22.071.188	Rp	14.714.126
182	MAKARTI	Rp	34.340.370	Rp	20.604.222	Rp	13.736.148
183	PERANGKAT SELATAN	Rp	33.904.726	Rp	20.342.836	Rp	13.561.890
184	PERANGKAT BARU	Rp	37.900.220	Rp	22.740.132	Rp	15.160.088
185	SEMANGKO	Rp	58.028.712	Rp	34.817.227	Rp	23.211.485
186	SAMBERA BARU	Rp	35.709.780	Rp	21.425.868	Rp	14.283.912

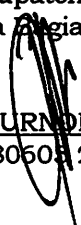
XVI	MUARA WIS						
187	MUARA WIS	Rp	36.994.586	Rp	22.196.751	Rp	14.797.834
188	SEBEMBAN	Rp	38.779.085	Rp	23.267.451	Rp	15.511.634
189	MELINTANG	Rp	34.372.928	Rp	20.623.757	Rp	13.749.171
190	ENGGELAM	Rp	49.651.694	Rp	29.791.016	Rp	19.860.678
191	LEBAQ MANTAN	Rp	30.832.679	Rp	18.499.607	Rp	12.333.072
192	LEBAQ CILANG	Rp	31.979.666	Rp	19.187.799	Rp	12.791.866
193	MUARA ENGGELAM	Rp	32.960.248	Rp	19.776.149	Rp	13.184.099
	Total	Rp	7.230.308.665	Rp	4.338.185.199	Rp	2.892.123.466

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780601 200212 1 002